



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 402 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PEMBERDAYAAN
SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SIMASORO
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), perlu upaya dan intervensi melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan sosial agar mampu menurunkan atau mengurangi risiko sosial;
- b. bahwa dalam upaya intervensi melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi melalui koordinasi, komunikasi dan pemberdayaan sosial bersama kepada kelompok masyarakat pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial;
- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Sosial Tunai Kepada Kelompok Masyarakat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Simasoro dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

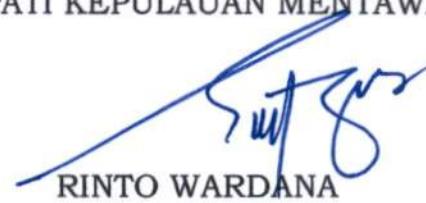
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bantuan Sosial Tunai Kepada Kelompok Masyarakat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Simasoro Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

- KEDUA : Pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaporkan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DPPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) (1.06.02.2.01), Sub kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT (1.06.02.2.01.0001).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 27 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA